

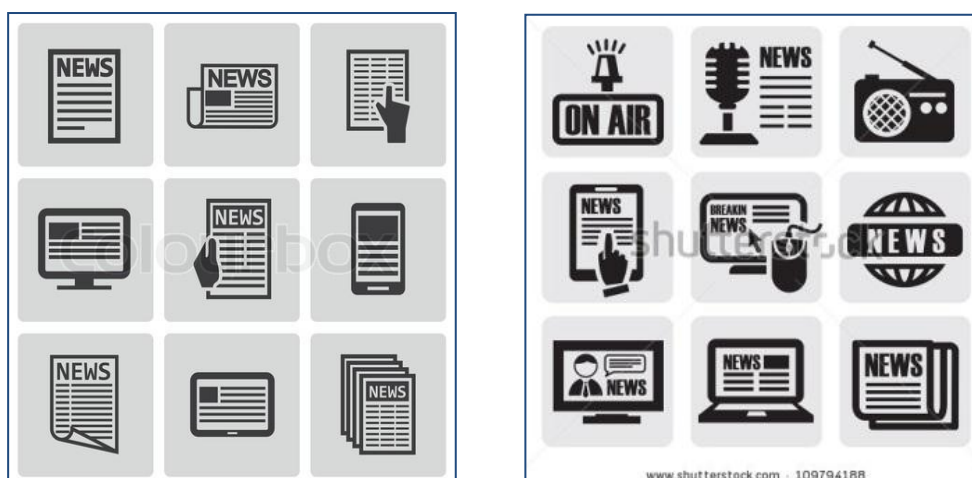


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Hukum & Aparatur

Rabu, 16 Maret 2016



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2016**

## **Daftar Isi**

1. KAPASITAS APARATUR DESA HARUS DITINGKATKAN (*Media Online Kompas*)

# KOMPAS

Rabu

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

16 Maret 2016

## Kapasitas Aparatur Desa Harus Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Dana desa yang nilainya terus meningkat setiap tahun menuntut pengelolaan yang lebih baik supaya betul-betul berguna untuk membangun desa. Pengelolaan dana ini bertumpu terutama pada aparatur desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi penting.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pelatihan aparatur desa harus diprioritaskan seiring terus meningkatnya jumlah dana desa. Maka, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) pun akan memfokuskan pada pelatihan aparatur desa untuk meningkatkan kapasitas mereka," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2016, di Jakarta, Selasa (15/3).

Dia mengklaim pelatihan aparatur pemerintah desa pada 2015 sebenarnya sudah berjalan baik menurut evaluasi Kemendagri. Namun, pelatihan harus kembali diintensifkan untuk memastikan aparatur desa paham betul soal pengelolaan dana desa hingga pertanggungjawabannya.

Dengan demikian, dana desa dipastikan sepenuhnya untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. "Kepala desa dan aparatur desa lain menjadi kunci tercapainya tujuan digulirkannya dana desa," katanya.

Apabila aparatur sudah pa-

ham, pendamping desa tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, aparatur desa yang tahu kondisi desanya dan paham kebutuhan masyarakatnya bisa sepenuhnya menyusun program secara mandiri dan tak memerlukan bantuan pendamping.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengatakan, tahun lalu, dari target 222.279 aparatur, pelatihan baru dapat dilakukan terhadap sekitar 165.000 aparatur desa. Target tak terpenuhi karena waktu yang tersedia tidak cukup.

Dengan kondisi itu, masih ada desa yang aparturnya belum dilatih. Mereka akan diprioritaskan mendapat pelatihan tahun ini.

Selain itu, pelatihan juga ditunjukkan bagi dua aparatur dari setiap pemerintah desa di total 74.754 desa yang belum dilatih tahun 2015.

"Kalau tahun lalu fokusnya yang dilatih kepala desa, sekretaris desa, dan pengelola keuangan desa, tahun ini yang dilatih perangkat desa lainnya seperti aparat desa yang membidangi soal pemerintahan dan pembangunan," paparnya.

Selain aparatur pemerintah desa, dua aparatur kecamatan juga akan dilatih mengenai manajemen pemerintahan desa, termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa. Mereka ditargetkan menjadi pendamping untuk pemerintahan desa.

Direktur Eksekutif Sekretariat Pemberdayaan Desa Iwan S Soelasno mengatakan, masih banyak desa yang aparturnya belum menerima pelatihan yang memadai dari pemerintah terkait penggunaan dana desa. Kalaupun sudah ada yang dilatih, bentuk pelatihan sering kali hanya sosialisasi. Pelatihan tidak mengajarkan aparat desa mengelola dana desa.

Dampaknya, kata Iwan, penyerapan dana desa menjadi tidak optimal. Salah satunya karena aparatur khawatir tersangkut kasus hukum. Kalaupun dana terserap optimal, penggunaannya sering meleset dari program yang diprioritaskan pemerintah. (APA)

**Dana desa yang nilainya terus meningkat setiap tahun menuntut pengelolaan yang lebih baik supaya betul-betul berguna untuk membangun desa. Pengelolaan dana ini bertumpu terutama pada aparatur desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi penting. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pelatihan aparatur desa harus diprioritaskan seiring terus meningkatnya jumlah dana desa. Maka, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) pun akan memfokuskan pada pelatihan aparatur desa untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia**

Hashtag Berita :

#KementerianDalamNegeri #RPJMN #DanaDesa #OtonomiDaerah #PembangunanDaerah #AparatDesa #PemberdayaanDesa